

**POLITIK PUPUK DAN REFORMASI TATA KELOLA
SUBSIDI PADA PETANI DI DESA TRITUNGGAL
KEC. BABAT KAB. LAMONGAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos)
dalam bidang Ilmu Politik



Milda Zakiyatur Rohmah

NIM 10010121015

Program Studi Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Januari, 2025

PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Milda Zakiyatur Rohmah

NIM : 10010121015

Program Studi : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Politik Pupuk dan Reformasi Tata Kelola Subsidi Pada Petani
Di Pemerintah Desa Tritunggal Kec.Babat Kab.Lamongan.

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga Pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atau karya orang lain.
3. Apabila Skripsi ini di kemudian hari terbukti sebagai karya plagiat, maka saya bersedia menanggung segala konsekuensi yang berlaku.

Surabaya, 31 Mei 2025

Yang Menyatakan

Milda Zakivatur Rohmah
NIM 10010121015

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan terhadap Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Milda Zakiyatur Rohmah

NIM : 10010121015

Program Studi : Ilmu Politik

Berjudul *Politik Pupuk dan Reformasi Tata Kelola Subsidi Pada Petani Di Pemerintah Desa Tritunggal Kec. Babat Kab. Lamongan*, saya berpendapat bahwa Skripsi tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu persyaratan bagi yang bersangkutan untuk memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Ilmu Politik.

Surabaya, Mei 2025

Dosen Pembimbing,



Dr. Hj. Aniek Nurhayati, M.Si.

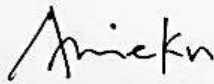
NIP. 196909071994032001

PENGESAHAN

Skripsi oleh Milda Zakiyatur Rohmah dengan judul *Politik Pupuk dan Reformasi Tata Kelola Subsidi Pada Petani di Pemerintah Desa Tritunggal Kec. Babat Kab. Lamongan* telah dipertahankan lulus oleh Tim Penguji Skripsi pada tanggal 18 Juni 2025.

Tim Penguji Skripsi

Penguji I



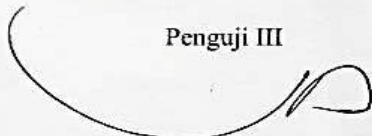
Dr. Hj. Aniek Nurhayati, M.Si
NIP 196909071994032001

Penguji II



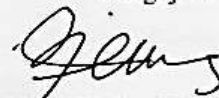
Laili Bariroh, M.Si
NIP 197711032009122002

Penguji III



M. Zimmamul Khaq, M.Si
NIP 198212022015031002

Penguji IV



Ajeng Widya Prakasita, M.A
NIP 199502232020122025

Surabaya, 18 Juni 2025

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan,



Prof. Dr. H. Abdul Chalik, M.Ag
NIP 197306272000031002

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Milda Zakiyatur Rohmah
NIM : 10010121015
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/ Ilmu Politik
E-mail address : mildazakiyatur@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

POLITIK PUPUK DAN REFORMASI TATA KELOLA SUBSIDI PADA PETANI

DI PEMERINTAH DESA TRITUNGGAH KEC. BABAT KAB. LAMONGAN

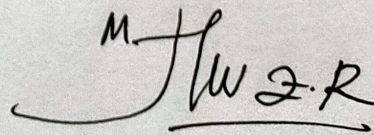
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 September 2025

Penulis



(Milda Zakiyatur Rohmah)

ABSTRAC

Rohmah, Milda Zakiyatur. *“Fertilizer Politics and the Reform of Fertilizer Subsidy Governance for Farmers in the Government of Tritunggal II Village, Babat Sub-District, Lamongan Regency.”*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2025.

This study discusses the dynamics of fertilizer politics and the reform efforts of fertilizer subsidy governance carried out by the Government of Tritunggal II Village, Babat Sub-District, Lamongan Regency. The background of this research is based on issues of subsidized fertilizer distribution that have long been considered unfair, prone to irregularities, and lacking transparency—especially before the change of village leadership in 2022. In this context, fertilizer is not only understood as an agricultural input but also as a political commodity laden with power interests. This research aims to analyze how the reform of fertilizer subsidy governance is implemented through inter-institutional partnership approaches and how local political interactions influence the course of fertilizer distribution.

This study employs a qualitative method with a case study approach, where data were collected through in-depth interviews with the village head, village officials, farmer groups, and recipient farmers. In analyzing the findings, the author uses two main theoretical frameworks: Keynesian Political Economy Theory to explain the state's role in agricultural subsidies, and Network Governance Theory to explore the importance of cross-actor collaboration in public policy management.

The results of the study indicate that after the 2022 Village Head Election (Pilkades), there was a significant change in the mechanism of subsidized fertilizer governance. The village government no longer played a dominant or centralized role but acted as a facilitator bridging the interests of various actors. Through the participatory restructuring of the Definitive Plan for Group Needs (RDKK), farmer data updates, and transparent decision-making, the fertilizer distribution system became fairer and more accountable. The reform also demonstrated the political role of the village head in transforming power relations into a collaborative model. The existence of regulations such as Presidential Regulation No. 6 of 2025 and Minister of Agriculture Regulation No. 47 of 2017 further legitimized the governance structure.

Keywords: *Fertilizer Subsidy, Governance, Village Government, Farmers, Reform, Keynesian, Network Governance.*

ABSTRAK

Rohmah, Milda Zakiyatur. “Politik Pupuk dan Reformasi Tata Kelola Subsidi Pupuk Pada Petani Di Pemerintah Desa Tritunggal Kec.Babat Kab.Lamongan”. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2025.

Penelitian ini membahas tentang dinamika politik pupuk dan upaya reformasi tata kelola subsidi pupuk yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tritunggal II, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Latar belakang penelitian ini dilandasi oleh persoalan distribusi pupuk subsidi yang selama ini dinilai tidak adil, rawan penyimpangan, dan kurang transparan, terutama sebelum pergantian kepemimpinan kepala desa pada tahun 2022. Dalam konteks ini, pupuk tidak hanya dipahami sebagai komoditas pertanian, tetapi juga sebagai komoditas politik yang sarat kepentingan kekuasaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana reformasi tata kelola subsidi pupuk dilaksanakan melalui pendekatan kemitraan antar lembaga, serta bagaimana interaksi politik lokal turut memengaruhi jalannya distribusi pupuk.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan kepala desa, perangkat desa, kelompok tani, dan petani penerima subsidi. Dalam menganalisis temuan, penulis menggunakan dua teori utama, yaitu teori Ekonomi Politik Keynesian untuk menjelaskan peran intervensi negara dalam subsidi pertanian, serta teori *Network Governance* untuk melihat pentingnya kolaborasi lintas aktor dalam pengelolaan kebijakan publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah Pilkades 2022, terjadi perubahan signifikan dalam mekanisme tata kelola pupuk subsidi. Pemerintah desa tidak lagi bersifat dominan atau sentralistik, melainkan berperan sebagai fasilitator yang menjembatani kepentingan antar aktor. Melalui penyusunan ulang RDKK yang lebih partisipatif, pendataan ulang petani, serta transparansi dalam pengambilan keputusan, sistem distribusi pupuk menjadi lebih adil dan akuntabel. Reformasi ini juga memperlihatkan peran politik kepala desa dalam mengubah relasi kekuasaan menjadi model kolaboratif. Keberadaan regulasi seperti Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2017 turut memperkuat legitimasi tata kelola tersebut.

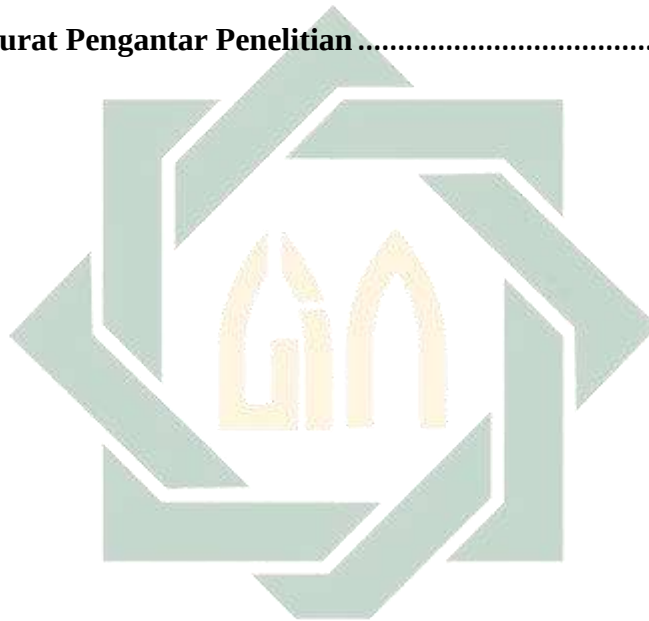
Kata Kunci: *Subsidi Pupuk, Tata Kelola, Pemerintah Desa, Petani, Reformasi, Keynesian, Network Governance.*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAC.....	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kajian Pustaka.....	15
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	33
BAB II	35
Prespektif teoritis dan Argumentasi Utama	35
A. Prespektif Teoritis	35

B. Landasan Konseptual.....	39
C. Kerangka Berpikir	43
D. Argumentasi Utama	44
BAB III.....	46
Metode Penelitian.....	46
A. Jenis dan Masalah Penelitian	46
B. Unit dan Peringkat Analisis.....	47
C. Situasi Sosial, Sampel dan Teknik Sampling.....	48
D. Teknik Pengumpulan Data.....	51
E. Teknik Analisis Data	53
F. Teknik Validasi Data	54
BAB IV	57
Reformasi Tata Kelola Subsidi Pupuk Sebelum Dan Sesudah Pemilihan	
Kepala Desa Tahun 2022 Di Desa Tritunggal	57
A. Kondisi Geografis	57
B. Kondisi Demografis	57
C. Kondisi Ekonomi	58
D. Sejarah dan Peran Kelompok Tani Mekar Sari.....	60
E. Tata Kelola Pupuk Pra Pemilihan Kepala Desa di Tahun 2022	62
F. Reformasi Tata Kelola Pupuk: Kemitraan antar Lembaga.....	74
BAB V.....	83
KESIMPULAN.....	83
A. Kesimpulan	83

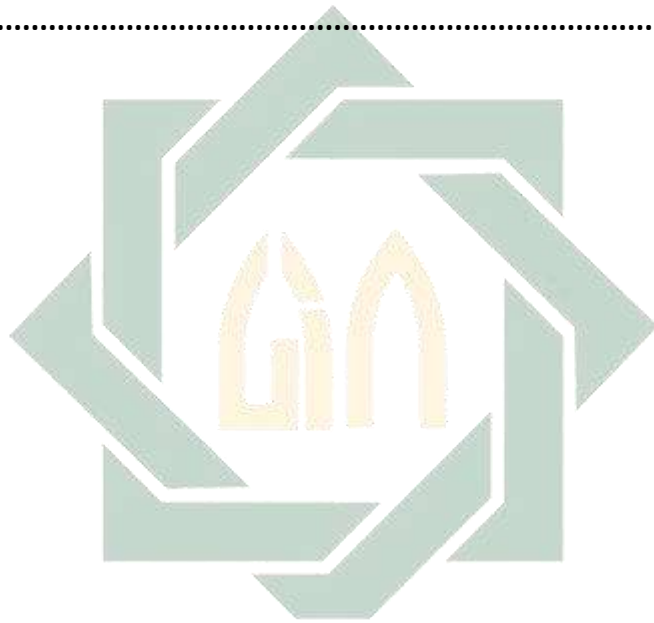
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....	xxii
LAMPIRAN.....	xxx
A. Dokumentasi Wawancara.....	xxx
A. Dokumentasi Foto.....	lii
C. Dokumen Surat Pengantar Penelitian	lvii



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

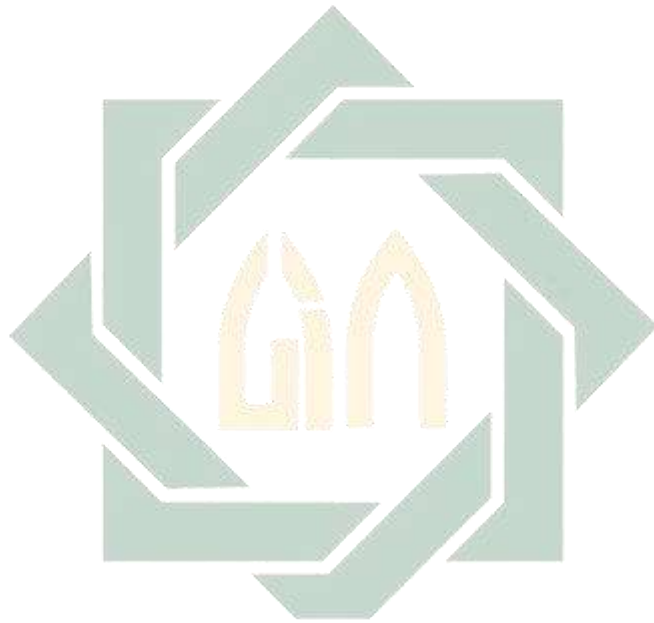
Tabel 1 Data Produksi.....	11
Tabel 2 Kerangka Berpikir	44
Tabel 3 Susunan Pengurus Kelompok Tani	48
Tabel 4 Sampel.....	50



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 e-RDKK Pupuk Bersubsidi Tahun 2025	49
---	----



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

11 Daerah Penghasil Padi Terbesar di Indonesia.
<https://koran.tempo.co/read/berita-utama/485632/11-daerah-penghasil-padi-terbesar-di-indonesia> (Diakses Pada 13 Agustus 2024).

Adiraputra Prasaktiyoga, dkk. 2021. The Effectiveness of Fertilizer Subsidy : How the Impact to the Production.

Afandi Nur, dkk. 2022. *Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Di Desa Campagaya Kecamatan Galengsong Kabupaten Takalar*. Jurnal Pertanian Arkeolog.

B, Rachman. (2021). “Masalah Tata Kelola dan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Indonesia.” *Jurnal Kebijakan Pertanian Nasional*, 6(2), 56–68.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTc5IzI=/produksi-padi-menurut-kabupaten-kota.html> (Diakses Pada 18 Oktober 2023).

Badan Pusat Statistik. 2021. *Statistik Pupuk dan Pestisida 2020*. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik. 2022. *Statistik Harga Produsen dan Konsumen Pupuk*. Jakarta: BPS.

Baskoro Aji, Fakultas Hukum, and Universitas Gadjah Mada, “Keadilan Dalam Tata Kelola Pangan : Kajian Keadilan John Rawls Terhadap Problematika” 26, no. 1 (2025).

Blinder, A. S. 2008. Keynesian Economics. In *The Concise Encyclopedia of Economics*. <http://www.econlib.org/library/Enc/KeynesianEconomics.html>.

Ciamis Dpkd. *Kebijakan Baru Tentang Pupuk Bersubsidi Pada Permentan No.10 Tahun 2022*. <https://dpkp.ciamiskab.go.id/kebijakan-baru-tentang-pupuk-bersubsidi-pada-permentan-no-10-tahun-2022/> (Diakses 11 Desember 2023).

Danisa Debora. Pengertian Analisis adalah Berikut Jenis dan Fungsinya. https://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/pengertian-analisis-adalah-berikut-jenis-dan-fungsinya#goog_rewarded (Diakses pada 1 September 2024).

Darwis Valeriana dan Supriyati. 2013. *Subsidi Pupuk; Kebijakan, Pelaksanaan, dan Optimalisasi Pemanfaatannya*. Analisis Kebijakan Pertanian. Vol. 11. No. 1

Dukung Integrasi Simluhtan dan E-RDKK Melalui Sosialisasi Ke Petani. <https://distani.tulangbawangkab.go.id/news/read/3013/dukung-integrasi-simluhtan-dan-e-rdkk-melalui-sosialisasi-ke-petani> (Diakses Pada 1 September 2024).

Erani. A, Yustika. 2008. *Politi Ekonomi: Peran Negara dala Mengelola Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

F Laksmi Sahla, dkk.2019. *Pertumbuhan dan hasil kajian (Brassica Oleracea var.Alboglabra) pada berbagai dosis pupuk kambing dan frekuensi pemupuan Nitrogen*. Jurnal Pertanian Tropik. Vol.6. No.3. (53) 438-447.

Gomez Osorio Camilio, dkk. 2011. Who Is Benefiting From Fertilizer Subsidy In Indonesia?. Policy Research Working Paper No.5758.

Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif : teori dan praktek*. Jakarta : Bumi Aksara, 2013. Hal 115.

Imam Wahyudi Wirahadi Syahputra. Skripsi: “Implementasi Kebijakan Subsidi Pupuk Pada Petani Padi Di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat”. (Aceh: Uin Ar-Raniry, 2020).

Jamil Ali, dkk. Subsidi Fertilizer Management in The Rice Production Centers of South Sulawesi, Indonesia: Bridging the gap between policy and practice

Junianda Nining. “Peran Ketersediaan Pupuk Subsidi dalam Meningkatkan Hasil Panen Padi di Desa Lili Riawang, Kabupaten Bone (Analisis Ekonomi Syariah)”. *Skripsi* 2023 (2023).

Kautsar Radinal Muhammad, Sofyan Sofyan, and Makmur Teuku, “Analisis Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Dan Pengaruhnya Terhadap Produktivitas Padi (*Oryza Sativa*) Di Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian* 5, no. 1 (2020): 97–107.

Kementan Gandeng Ombudsman Optimalisasi Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi. <https://psp.pertanian.go.id/berita/kementan-gandeng-ombudsman-optimalisasi-pengawasan-penyaluran-pupuk-bersubsidi> (Diakses 14 Oktober 2023).

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian*.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia. *Kebijakan Pupuk Bersubsidi dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional*. Jakarta:Ditjen PSP. 2020.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia. *Pedoman Teknis Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2021*. Jakarta: Direktorat Jenderal PSP.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/M/11/2017 tentang Peruntukan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian*, Jakarta: Kementan, 2017

Kementerian Pertanian RI. 2020. *Petunjuk Teknis Penggunaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2020*. Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian.

Krisna Bayu, Mamilianti Wenny, dan Nuzuliyah Laila, “PENGARUH PUPUK SUBSIDI TERHADAP PENDAPATAN PETANI PADI (Studi Kasus Di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan),” *Journal of Agricultural Socio-Economics (JASE)* 3, no. 2 (2022): 73–79.

Lestary Dany Febby and Yasin Muhammad, “Analisis Dampak Kelangkaan Pupuk Terhadap Pendapatan Petani Padi Di Desa Kacangan Kabupaten Lamongan,” *Jurnal Riset Manajemen Dan Ekonomi (JRIME)* 1, no. 4 (2023): 53–58.

Limanseto Haryo. *Benahi Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, Pemerintah Siapkan Sektor Pertanian Lebih Inovatif dan Adaptif dengan kemajuan Teknologi*. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/4355/benahi-tata-kelola-pupuk-bersubsidi-pemerintah-siapkan-sektor-pertanian-lebih-inovatif-dan-adaptif-dengan-kemajuan-teknologi> (Diakses 14 Oktober 2023).

M. J. Keynes. 1936. *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. London: Macmilan.

Mulyono Joko, dkk. 2023. *Global Fertilizer Crisis: The Impact On Indonesia*.

sejahteraan Produsen dan Konsumen

nologi. Universitas Muhammadiyah

ative Organization Dalam Implement

plementasi Program Pemberdayaa

1).

lls. 2018. *Macroeconomics* (5th ed.)

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

Pemerintah Dorong Peningkatan Sektor Pangan dan Pertanian Untuk Kesejahteraan Masyarakat.

<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/647/pemerintah-dorong-peningkatan-sektor-pangan-dan-pertanian-untuk-kesejahteraan-masyarakat-indonesia> (Diakses 18 Oktober 2023).

Pemerintah Kucurkan 25 T Subsidi Pupuk Untuk 9 Komoditas Ini.
<https://saloipost.id/2022/07/17/pemerintah-kucurkan-25-triliun-subsidi-pupuk-untuk-9-komoditas-ini/> (Diakses Pada 18 Oktober 2023).

xxvi
<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

60913822/BP000004.xml&hl=id&sl=en&tl=id&client=sge&prev=search#:~:text=Denzin%20and%20Lincoln%20(1994)%20define,These%20practices%20transform%20the%20world. (Diakses Pada 20 Agustus 2024).

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/M/11/2017 tentang Peruntukan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Perppu Cipta Kerja Mudahkan Pelaku Usaha Sektor Pertanian Mendapatkan Izin Usaha. <https://pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=5228> (Diakses pada 28 Oktober 2023).

PERPRES NO.15 Tahun 2011.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41149/perpres-no-15-tahun-2011>
(Diakses Pada 28 Agustus 2023).

Pratama Tirta Dimas dan Handoyo Pambudi, “Strategi Coping Petani Dalam Mencari Tambahan Pupuk (Studi Pada Masyarakat Desa Ngampel Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang),” *Paradigma* 11, no. 1 (2023): 1–20.

PSP Pertanian. <https://psp.pertanian.go.id/storage/1429/Petunjuk-Teknis-Pengelolaan-Pupuk-Bersubsidi-TA-2023.pdf> (Diakses pada 28 Agustus 2023).

Rachman Benny, dkk. 2016. “Impacts and Future Prespectives Of Fertilizer Policy In Indonesia”. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*. Vol.8. No.3. September.

Relasi angka KSA BPS produksi padi di kabupaten lamongan. 2024.
<https://lamongankab.go.id/beranda/dinkpp/posting/19484> (Diakses 16 Nov 2024).

Safitri Ayu Meliana, “Distribusi Pupuk Subsidi Kepada Petani Tebu Dalam Perspektif Manajemen Publik (Studi Pada Koperasi Unit Desa Di Sumberpucung Kabupaten Malang)” (Brawijaya University, 2011).

Samuelson, P. A., Nordhaus, W. D. 2010. *Economics* (19th ed). New York:WcGraw-Hill.

Sastra Eka. 2023. Berburu Rente (Kajian Kritis Subsidi Pupuk di Indonesia dalam Prespektif Ekonomi Politik)

Serdang Deli, “Peranan Kelompok Tani Dalam Pembagian Pupuk Bersubsidi Di Desa Pasar Melintang , Deli Serdang The Role of Farmer Groups in Distribution of Subsidized Fertilizer in Pasar Melintang” 13, no. September (2023): 101–9, <https://doi.org/10.35724/ag.v13i2>.

Serdang, “Peranan Kelompok Tani Dalam Pembagian Pupuk Bersubsidi Di Desa Pasar Melintang , Deli Serdang The Role of Farmer Groups in Distribution of Subsidized Fertilizer in Pasar Melintang.”

Setiawan Chandra Arrief, dkk. 2021. Direct Fertilizer Subsidies on Production and Household Income in Indonesia.

Simatupang, dkk. 2011. “Kebijakan dan Dampak Subsidi Pupuk di Indonesia”. Bogor:PSEKP.

Simatupang, dkk. 2011. *Kebijakan dan Dampak Subsidi Pupuk di Indonesia*. Bogor: Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP).

Siti Fatimah Astri, dkk. 2024. “Dynamics of Fertilizer Subsy Implementation : A Case Study of Agricultural Policy in Indonesia”. *International Journal of Science and Society*. Vol.6. No.1. Hal 822-835.

Suhamah Emay and Sumantri Kosasih, “Implementasi Program Kartu Tani Dalam Distribusi Pupuk Implementation Of The Farmer Card Program In Subsidized” 3, no. 1 (2024): 16–20.

Suryana, A. 2014. “Kelembagaan Distribusi Pupuk Subsidi: Strategi Penguatan Kelembagaan Pertanian”. *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 32(1). Hal 15-27.

Tim Peneliti Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. (2020). *Evaluasi Program Subsidi Pupuk dan Dampaknya terhadap Petani*. Jakarta: Balitbangtan, Kementerian Pertanian RI.

Widiati Yuli Kusno et al., “Pemasaran Pupuk Di Indonesia” 11, no. 1 (2025): 1–18.

Zulaiha Ratna Aida, dkk. 2018. “Kinerja Subsidi Pupuk di Indonesia”. *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen*. Vol.4. No.2.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A